



PENGUMUMAN LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA

(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 6 Januari 2025/Khusus - Awal Menjabat)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF

LEMBAGA : BADAN PUSAT STATISTIK (BPS)

UNIT KERJA : BADAN PUSAT STATISTIK PROVINSI JAWA TENGAH

I. DATA PRIBADI

Nama : RUKHEDI
 Jabatan : KEPALA
 NHK : 1010366

II. DATA HARTA

| A. TANAH DAN BANGUNAN | Rp. | 200.000.000 |
|-----------------------|-----|-------------|
|-----------------------|-----|-------------|

1. Tanah dan Bangunan Seluas 104 m2/100 m2 di KOTA SEMARANG

, HASIL SENDIRI Rp. 200.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 1.000.000

1. LAINNYA, POLYGON SIERA Tahun 2017, HASIL SENDIRI Rp.

1.000.000

| IV. To | OTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) | WOK- | WOK- | Rp. | 173.077.102 |
|--------|------------------------------|------|------|-----|-------------|
| III. H | JTANG | | | Rp. | 38.854.073 |
| PI. | Sub Total | KON | KPI | Rp. | 211.931.175 |
| F | . HARTA LAINNYA | af . | al . | Rp. | of a |
| Е | . KAS DAN SETARA KAS | M | M | Rp. | 931.175 |
| D | . SURAT BERHARGA | al- | N. | Rp. | at all |
| C | . HARTA BERGERAK LAINNYA | | | Rp. | 10.000.000 |

Catatan:

- 1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
- 3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.